

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak menurut Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan keempat atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹

Salah satu tujuan dari berdirinya Republik Indonesia adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Oleh karena itu, konsep negara kesejahteraan kerap disuarakan di panggung politik. Negara kesejahteraan yang dimaksudkan ialah suatu bentuk pemerintahan demokratis yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat, bahwa pemerintah harus mengatur pembagian kekayaan negara agar tidak ada rakyat yang kelaparan, tidak ada rakyat yang menemui ajalnya

¹ Sri Narwanti, *Perpajakan*, (Yogyakarta : Istana Media, 2018), hal 1

karena tidak memperoleh jaminan. sosial, di Indonesia, penerimaan pemerintah atau yang juga biasa disebut penerimaan negara bersumber dari pendapatan negara dan pembiayaan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan negara didefinisikan sebagai hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dan terdiri dari pendapatan dalam negeri yang bersumber dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak; serta hibah yang diperoleh dari pemerintah negara lain maupun tingkat pemerintah lainnya. Penerimaan yang berasal dari pembiayaan bersumber dari pinjaman yang nantinya perlu dikembalikan.

Pada hakikatnya pajak merupakan sarana untuk mensejahterakan rakyat. Amanat kesejahteraan rakyat ini dapat direalisasikan manakala pemerintah mampu mengumpulkan pajak dari warga Negara dan digunakan untuk membangun bangsa dan Negara Indonesia. Pajak merupakan faktor penting bagi keuangan suatu Negara dalam menjamin kelangsungan pembangunan nasional. Sistem pajak yang efektif sebagai sumber pendapatan dalam negeri akan mampu menggerakkan roda pembangunan untuk dapat keluar dari ketergantungan terhadap bantuan asing dan sumber daya alam. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak,

model perencanaan permintaan pajak perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan faktor – faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak suatu Negara adalah kegiatan perekonomian dalam Negara tersebut. Perekonomian suatu Negara dibentuk berdasarkan persamaan identitas Oleh karena itu , Penerimaan Pajak mempunyai peranan yang penting merupakan indikator untuk menunjukkan kuat lemahnya fundamental perekonomian suatu negara, sepanjang tahun 2020 penerimaan pajak dimana secara lebih rinci realisasi penerimaan Pajak mencapai 89,25 % terhadap APBN Perpres 72/2020. Penerimaan Pajak tersebut tumbuh negatif 19,71 % (yoy). Penerimaan Pajak secara nominal utamanya berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas dan Pajak Pertambahan Nilai/ Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM), penerimaan perpajakan sebesar Rp1.282,77 triliun (91,33 persen dari target APBN Perpres 72 tahun 2020).² Realisasi penerimaan pajak tahun 2021 sebesar Rp1.231,87 triliun atau 100,19% dari target yang diamanatkan dalam APBN TA 2021

² <https://www.kemenkeu.go.id/media/17049/apbn-kita-januari-2021.pdf>
diakses

pada 10 September 2021 pukul 4:16 Wib.

sebesar Rp1.229,6 triliun, bertumbuh lebih dari 16%. Di APBN 2021, penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp1.229,6 triliun atau lebih tinggi 14,7% dari realisasi penerimaan pajak tahun 2020. Dengan rincian, Pajak Penghasilan (PPH) ditargetkan Rp638 triliun, lebih tinggi 15,1% dari realisasinya tahun 2020 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah PPnBM ditargetkan Rp518,5 triliun, lebih tinggi 15,1% dari realisasinya tahun 2020. Dengan target sebesar itu, penerimaan pajak akan berkontribusi sebesar 44,7% dari total APBN 2021.³ Pada tahun 2022 realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp2.034,5 triliun atau 114% dari target Perpres 98/2022 sebesar Rp1.784 triliun, tumbuh 31,4% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.547,8 triliun. Penerimaan pajak berhasil mencapai Rp1.717,8 triliun atau 115,6% berdasarkan target Perpres 98/2022, tumbuh 34,3% jauh melewati pertumbuhan pajak tahun 2021 sebesar 19,3%. Hal ini berarti kinerja pajak membaik ditunjukkan oleh

³<https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/tercapainya-realisisi-penerimaan-pajak-2021,-momentum-penyehatan-apbn> Pada 11 Februari 2022 Pukul 15 : 15 Wib.

realisasi yang melampaui target selama dua tahun berturut-turut⁴.

$Y = C + I + G + (X - M)$. Dimana Y adalah produk domestik bruto (PDB), C adalah konsumsi, I adalah investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor dan M adalah impor, kenaikan konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah serta net ekspor dan impor akan menyebabkan kenaikan PDB yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak.

Inflasi memiliki arti sebagai meningkatnya harga - harga secara umum dan terus - menerus, inflasi merupakan salah satu dari sekian masalah ekonomi yang cukup banyak mendapatkan perhatian para ekonom. Sebagaimana diketahui, bahwa salah satu tujuan utama dalam perekonomian yaitu memelihara tingkat harga - harga yang relatif stabil. Namun akhir - akhir ini kita menghadapi masalah yang cukup sulit, oleh karena itu dalam aktivitas perekonomian menghadapi ketidakstabilan harga - harga, ada dua hal yang mengakibatkan ketidakstabilan harga tersebut yaitu inflasi dan deflasi.⁵ Inflasi adalah gejala ekonomi yang menunjukkan naiknya

⁴<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Penerimaan-Negara-Luar-Biasa> Pada 11 Februari 2023 Pukul 20 : 16 Wib.

⁵ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro Edisi Pertama*. (Jakarta: Kencana, 2016) h.186

tingkat harga secara umum yang berkesinambungan. Syarat inflasi yaitu terjadi kenaikan harga - harga secara umum dan terus - menerus. Jika hanya satu atau dua barang saja yang naik, itu bukan inflasi. Kenaikan harga yang bersifat sementara, contohnya kenaikan harga karena musiman, menjelang hari raya, bencana, dan sebagainya, Tidak disebut inflasi.⁶ Sepanjang tahun pada 2020 tercatat rendah 1,68% dan berada di bawah kisaran sasaran 3,0% dengan deviasi masing-masing $\pm 1\%$, Inflasi yang rendah tersebut dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat sebagai dampak pandemi Covid-19. pada Inflasi tahun 2021 yang rendah dipengaruhi inflasi yang tercatat sebesar 1,56%, sedikit menurun dibandingkan inflasi tahun sebelumnya. Rendahnya inflasi terutama dipengaruhi oleh belum kuatnya permintaan domestik seiring dengan kebijakan pembatasan mobilitas yang harus ditempuh untuk mencegah penyebaran Covid-19 di tengah pengaruh tekanan harga global ke domestik yang minimal. Pada tahun 2022 inflasi menjadi 5,51% meningkat dibanding inflasi tahun sebelumnya yang hanya 1,56% dan lebih tinggi dari sasaran 3,0% terutama dipengaruhi oleh dampak penyesuaian harga bahan bakar minyak.

⁶ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi ...* h.186

Nilai tukar satu mata uang terhadap lainnya merupakan bagian dari proses valuta asing. Nilai tukar merupakan jumlah mata uang dalam negeri yang harus dibayarkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing⁷. Kenaikan nilai tukar disebut apresiasi dan penurunan nilai tukar di sebut depresiasi. Kadang-kadang anda mendengar media massa melaporkan bahwa dolar sedang “menguat” dan “melemah”. Pernyataan ini biasanya mengacu pada perubahan-perubahan terbaru dari nilai tukar. jika suatu mata uang mengalami apresiasi, dikatakan bahwa mata uang itu menguat karena dapat membeli lebih banyak uang asing. Demikian pula ketika suatu mata uang mengalami depresiasi, di katakana bahwa mata uang tersebut melemah⁸. Kurs akan menentukan nilai barang dan mempengaruhi peningkatan daya saing, kurs yang berlaku berdampak terhadap hubungan transaksi berjalan dan keputusan investasi dalam negeri. Kurs yang mampu menarik perhatian akan menimbulkan rasa kepercayaan.⁹ melemahnya dan menguatnya

⁷ Richard G. Lipsey dkk, *Pengantar Makro Ekonomi*,(Jakarta: Erlangga, 1992),Edisi Ke 8, h. 379.

⁸ N. Gregory Mankiw, *pengantar Ekonomi*,(Jakarta:Erlangga,2003),Edisi Kedua, h.221.

⁹ Ragil Wijaya, “ *Perbandingan Determinan Cadangan Devisa Di Asean Dan Australia Periode Sebelum Krisis Dan Sesudah Krisis Ekonomi Asia*”, dalam skripsi UNS Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan-F.0107013-2011, , <http://digilib.uns.ac.id/> di unduh 10 agustus 2021 hal 20.

kurs berdampak pada variabel makro seperti ekspor dan impor.

Impor menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Sedangkan pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Lintas Kontinen yang didalamnya berlaku Undang - Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Nilai Impor pada tahun 2020 mencapai 141.568,8 juta dollar, pada tahun 2021 mencapai 196.190,0 juta dollar naik sebesar 38,58 %, pada tahun 2022 mencapai 183.231,30 juta dollar.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul “**Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar dan Impor terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan identifikasi masalah

sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi kondisi perkembangan penerimaan pajak.
2. Tingkat inflasi yang tidak stabil.
3. Kenaikan nilai tukar dollar terhadap rupiah.
4. Peningkatan nilai impor berdampak pada penerimaan Pajak.
5. Variabel ekonomi makro seperti tingkat inflasi nilai tukar dan nilai Impor dinilai memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian ini lebih fokus pada permasalahan tidak melebar dalam penelitian, mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan finansial. Maka peneliti hanya berfokus pada Variabel bebas (X) dan Variabel terikat (Y). Dimana Variabel bebas yaitu inflasi nilai tukar dan impor, serta variabel terikat dalam penelitian ini yaitu penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 1989 sampai tahun 2022.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka pada penelitian ini akan diidentifikasi bagaimanakah karakteristik

perkembangan penerimaan pajak serta variabel yang diperkirakan menentukan penerimaan pajak, antara lain inflasi, nilai tukar dan impor. Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat disusun pertanyaan penelitian berupa:

1. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaruh nilai tukar terhadap penerimaan pajak di Indonesia ?
3. Bagaimana pengaruh impor terhadap penerimaan pajak di Indonesia ?
4. Bagaimana pengaruh inflasi, nilai tukar dan impor secara bersama - sama terhadap penerimaan pajak ?

E. Tujuan Masalah

Maka berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh nilai tukar terhadap penerimaan pajak di Indonesia.

3. Untuk mengetahui pengaruh impor terhadap penerimaan pajak di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh inflasi, nilai tukar terhadap penerimaan pajak di Indonesia.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti:

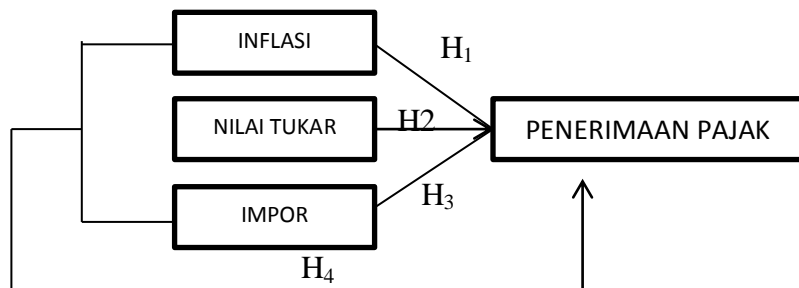
Peneliti ini merupakan sarana untuk belajar, menambah wawasan dan memberdayakan pengetahuan mengenai pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya dalam menganalisa Inflasi, Nilai Tukar Kurs Dollar Amerika, terhadap Penerimaan Pajak Indonesia.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat menambah referensi dipergustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanudin Banten sehingga dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa sebagai data ataupun informasi untuk kegiatan belajar. Selain itu pula penelitian ini menjadi tolak ukur keberhasilan lembaga dalam memberi pendidikan kepada mahasiswa.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti serta sekaligus menggambarkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistic yang akan digunakan¹⁰. Berikut adalah kerangka Pemikiran dari penelitian ini :



Dari kerangka penelitian dapat dilihat bahwa variabel yang akan digunakan yaitu empat variabel, meliputi tiga variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Inflasi (X_1) Nilai Tukar (X_2), dan Impor (X_3), serta variabel terikat atau dependen ialah Penerimaan Pajak Indonesia (Y).

¹⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan Ke-22. (Bandung: Alfabeta 2015), h 42.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam 5 (lima) Bab yang akan berkaitan satu sama lainnya, dan setiap Bab berisi beberapa sub bagian yang disusun secara sistematis.

BAB I PENDAHULUAN :

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, sistematika penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA :

Pada bab ini menguraikan tentang pengertian Inflasi, Nilai Tukar Impor dan Penerimaan Pajak serta hasil – hasil penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN :

Pada bab ini menguraikan tentang waktu dan tempat penelitian, penentuan populasi dan sampel, jenis metode penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN :

Pada bab ini berisi tentang deskriptif data, deskriptif semua variabel serta hasil penelitian dan pembahasan

BAB V PENUTUP :

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang telah dilakukan dan saran sebagai masukan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian yang akan datang.